



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka dalam rangka menjamin keberlanjutan agar perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Buton Selatan Periode 2017-2022, perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buton Selatan
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

- Buton Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
 8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 4 (empat) tahunan.
 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode I (satu) tahun.
 10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 4 (empat) tahun.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPD dirumuskan secara :
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien,
 - d. efektif
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif,
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan
 - i. berwawasan lingkungan;
- (2) Perumusan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memerhatikan kesesuaiannya terhadap :
 - a. RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023,
 - c. RPJPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2005-2025;
 - d. RTRW Kabupaten Buton Selatan,
 - e. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan
 - f. berorientasi pada kinerja daerah dan perangkat daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan RPD adalah :

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah.
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergis dan terpadu dengan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- c. sebagai pedoman dalam :
1. penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun;
 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 4 (empat) tahun; dan
 3. penyusunan APBD berdasarkan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 4 (empat) tahun.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPD

Pasal 4

- (1) RPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) Sistematika RPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Umum;
 - BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - BAB IX Penutup.
- (3) Isi dan uraian sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPD; dan
 - b. pelaksanaan RPD.
- (3) Evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebijakan pelaksanaan RPD;
 - b. pelaksanaan RPD; dan

- c. hasil RPD.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. mencakup antara lain terjadinya :
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah;
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPD periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan;
 - b. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. Indikator, pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
 - c. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindari terjadinya kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD atau RPJMD teknokratik periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

**TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BUTON SELATAN TAHUN 2023-2026**

A. DAFTAR ISI

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023-2026**

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-15
	1.5. Sistematika Penulisan	I-17
BAB II	GAMBARAN UMUM	II-1
	2.1. Aspek Geografi	II-2
	2.2. Aspek Demografi	II-19
	2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-22
	2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-43
	2.5. Aspek Daya Saing Daerah	II-84
	2.6. Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD	II-120
	Kabupaten Buton Selatan	
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-36
	3.3. Kerangka Pendanaan	III-46
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
	2.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
	2.2. Isu Strategis	IV-28
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN	VI-1
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	VII-1
	DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
	8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama	VIII-1
	8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-2
	8.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VIII-62
	8.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	VIII-69
BAB IX	PENUTUP	IX-1

B. DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Wilayah Kecamatan dalam GiS Kabupaten Buton Selatan Berdasarkan Analisa GIS tahun 2022
Tabel	2.2	Luas penggunaan Lahan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.3	Jumlah Penduduk dan Karakteristiknya Menurut Kecamatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.4	PDRB Per Kapita Kabupaten Buton Selatan tahun 2017-2021
Tabel	2.5	Distribusi PDRB ADH Berlaku menurut Kategori Lapangan Usaha (%) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2021
Tabel	2.6	Perkembangan Indikator Penyusunan IPM Tahun 2019-2021
Tabel	2.7	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.8	Angka Putus Sekolah Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.9	Kualitas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Kerja Tahun 2021
Tabel	2.11	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021
Tabel	2.12	Sarana Olahraga Menurut Kecamatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.13	Rasio Guru dan Murid Di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.14	Rasio Sekolah dan Murid di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.15	Rasio Kelas dan Guru di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.16	Indikator Pelayanan Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.17	Fasilitas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.18	Indikator Pelayanan Urusan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.19	Angka Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2021
Tabel	2.20	Pencapaian Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.21	Capaian Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.22	Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.23	Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.24	Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.25	Jumlah Pasar Menurut Jenisnya dan Wilayah Kecamatan Tahun 2021
Tabel	2.26	Jumlah Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi Industri dan Kecamatan Tahun 2021
Tabel	2.27	Banyaknya Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.28	Produksi Perikanan Laut dan Budidaya di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021

Tabel	2.29	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.30	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.31	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.32	Luas Fungsi Hutan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.33	Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting Menurut Rayon Tahun 2021
Tabel	2.34	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.35	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.36	Jumlah Pelanggan Air yang Disalurkan menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.37	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Rayon
Tabel	2.38	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kecamatan
Tabel	2.39	Rasio Ketergantungan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.40	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang DITamatkan
Tabel	2.41	Hasil Analisa Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	2.42	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022–Sasaran yang meningkatnya onektifitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar (2019-2020)
Tabel	2.43	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran untuk meningkatnya Konektifitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar (2021)
Tabel	2.44	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran untuk meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (2019-2020)
Tabel	2.45	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran meningkatnya Kualits Pembangunan Manusia (2019-2020)
Tabel	2.46	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia (2021)
Tabel	2.47	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran tercapainya Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik (2019-2020)
Tabel	2.48	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran tercapainya Tingkat Kepuasan Publik (2021)
Tabel	2.49	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Tercapainya Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik (2019-2020)

Tabel	2.50	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Tercapainya Tingkat Kepuasan Pelayan Publik (2021)
Tabel	2.51	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja (2019-2020)
Tabel	2.52	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja (2021)
Tabel	2.53	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran:Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah (2019-2020)
Tabel	2.54	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah (2021)
Tabel	2.55	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Sektor-Sektor Unggulan yang Berbasis Potensi lokal (2019-2020)
Tabel	2.56	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran: Berkembangnya Sektor-Sektor Unggulan yang Berbasis Potensi Lokal (2021)
Tabel	2.57	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Kapasitas Angkatan Kerja Lokal (2019-2021)
Tabel	2.58	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Kapasitas Angkatan Kerja Lokal (2021)
Tabel	2.59	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat (2019-2020)
Tabel	2.60	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat (2021)
Tabel	2.61	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Kualitas Penelolaan Budaya dan Pariwisata (2019-2020)
Tabel	2.62	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode Pelaksanaan Tahun 2017-2022 – Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Budaya dan Pariwisata (2021)
Tabel	3.1	Skala Interval Otonomi Fiskal
Tabel	3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022
Tabel	3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021

Tabel	3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	3.7	Rasio Lancar Tahun 2017-2021
Tabel	3.8	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Tahun 2018-2022
Tabel	3.9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Tahun 2018-2020
Tabel	3.10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Tahun 2017-2021
Tabel	3.11	Rasio Perputaran Total Aktiva Tahun 2018-2020
Tabel	3.12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	3.13	Anlisis Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	3.14	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	3.15	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	3.16	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021 (dalam ribuan)
Tabel	3.17	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026
Tabel	3.18	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026
Tabel	3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan Realisasi Tahun 2023-2026
Tabel	4.1	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Panjang Kabupaten Buton Selatan Tahun 2005-2025
Tabel	4.2	Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	4.3	Kawasan Lindung Kabupaten Buton Selatan
Tabel	4.4	Kawasan Budidaya Kabupaten Buton Selatan
Tabel	5.1	Keterkaitan RPJPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2005-2025 Periodesasi KE IV dengan RPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026
Tabel	5.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembanguna Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026
Tabel	5.3	Keterkaitan Indikator Daerah dan Indikator Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026
Tabel	6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026
Tabel	6.2	Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	6.3	Strategis/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Buton Selatan 2023-2026
Tabel	6.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026

Tabel	7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Buton Selatan
Tabel	8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026
Tabel	8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026
Tabel	8.3	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026
Tabel	8.4	Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026

C. DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Hubungan Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Gambar	1.2	Hubungan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Penganggaran
Gambar	1.3	Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang
Gambar	2.1	Peta Wilayah Adminstrasi Kabupaten Buton Selatan
Gambar	2.2	Rata-rata Suhu Udara Menurut Bulan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Gambar	2.3	Peta Rawan Bencana Kabupaten Buton Selatan
Gambar	2.4	Piramida Penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Gambar	2.5	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Gambar	2.6	Grafik Indeks Gini Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
Gambar	2.7	Grafik IPM Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
Gambar	2.8	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
Gambar	2.9	Grafik Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
Gambar	2.10	Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
Gambar	2.11	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
Gambar	2.12	Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
Gambar	2.13	Grafik Panjang Jalan dan Kondisi Jalan (Km) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Gambar	2.14	Grafik Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Gambar	2.15	Grafik Wisatawan Yang Berkunjungan di Kabupaten Buton Selatan

- Gambar 3.1 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
- Gambar 3.2 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021 (dalam miliar)
- Gambar 3.3 Peningkatan Pendapatan Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2017- 2021
- Gambar 3.4 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2017-2021 (Dalam miliar)
- Gambar 3.5 Proporsi Belanja Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021 (dalam miliar)
- Gambar 3.6 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Pembiayaan Netto Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021 (dalam miliar)
- Gambar 4.1 Capaian kinerja indeks gini Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2020
- Gambar 4.2 Persentase capaian kinerja infrastruktur dasar Tahun 2020
- Gambar 4.3 Perkembangan indeks gini Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2020
- Gambar 4.4 Perkembangan indeks gini Kabupaten Buton Selatan Dan Kabupaten Kota Sekitar Tahun 2020
- Gambar 4.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
- Gambar 4.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Selatan dengan daerah disekitarnya, Provinsi dan Nasional Tahun 2021
- Gambar 4.7 Capaian kinerja IPM Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2021
- Gambar 4.8 Capaian kinerja pembangunan indeks reformasi birokrasi Tahun 2020
- Gambar 4.9 Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2020
- Gambar 4.10 Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan dengan daerah disekitarnya, Provinsi dan Nasional Tahun 2020
- Gambar 4.11 Capaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2021
- Gambar 4.12 Capaian kinerja LPE non pertambangan dan penggalian, investasi PMA dan PMDN dan TPT Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020
- Gambar 4.13 Perkembangan PDRB Perkapita (Juta Rp.) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2020
- Gambar 4.14 Capaian kinerja pembangunan PDRB Perkapita (Juta Rp.) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020
- Gambar 4.15 Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021

- Gambar 4.16 Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Buton Selatan, Daerah Sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2021
- Gambar 4.17 Capaian kinerja pembangunan kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2021
- Gambar 4.18 Tujuan SDGs
- Gambar 5.1 Keterkaitan Visi terhadap Misi Jangka Panjang Kabupaten Buton Selatan.

